

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Sleman)**

Rifki Fitra Jati Nugraha

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: rifkifjn@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of human resources competency, utilization of information technology, and the application of Government Accounting Standards on the quality of local government financial report. As for the background of this research is the high expectation of the people at this time about governance that is accountable and transparent in the financial reporting. The subjects in this study were the SKPD employees of Sleman Regency in the finance/accounting department. This study uses primary data with the survey method. In this study a sample of 89 respondents were selected using the sampling technique in the form of purposive sampling. The analytical tool used is IBM SPSS 16.0 software. Based on the results of data analysis shows that the human resources competency, utilization of information technology, and the application of Government Accounting Standards gives positive affect to the quality of local government financial report.

Keywords: Human Resources Competency, Utilization of Information Technology, Application of Government Accounting Standards, Quality of Local Government Financial Report

PENDAHULUAN

Upaya yang dapat dilakukan demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dengan menyajikan laporan pertanggungjawaban yang berupa sebuah laporan keuangan (Yosefrinaldi, 2013). Pemerintah daerah akan dikatakan berhasil dalam menjalankan suatu pemerintahannya apabila dapat menyajikan laporan keuangan secara transparan, serta dapat digunakan sebagai acuan untuk cara pemakaian pengguna laporan keuangan (Nurillah, 2014).

Penyampaian laporan keuangan yang benar harus sesuai dan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, patuh terhadap standar akuntansi yang ada dan didukung sistem akuntansi yang handal akan memengaruhi kualitas informasi yang terdapat di laporan keuangan pemerintah daerah (Nurillah, 2014). Dalam Peraturan Pemerintahan No. 71

tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 8 bahwa Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Demi berkualitasnya laporan keuangan, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi serta paham dalam akuntansi pemerintahan yang didukung dengan pengetahuan dan pengalaman di bidang akuntansi. Isu yang beredar saat ini di masyarakat adalah banyak pegawai pemerintahan yang tidak punya pendidikan akuntansi dan pengalaman dapat bekerja di bagian akuntansi pemerintah. Apabila sumber daya manusia tidak memenuhi syarat yang disyaratkan, hal yang dapat terjadi akan menimbulkan masalah seperti hambatan dalam pelaporan keuangan, dan tentu saja akan memperburuk kualitas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas juga membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini telah diatur oleh pemerintah daerah dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik, pemerintah perlu mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Dalam hal ini peneliti memilih Kabupaten Sleman sebagai obyek penelitian karena pemerintah Kabupaten Sleman mampu mendapatkan opini WTP dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas pada tahun 2013-2017 (Sumber: <http://yogyakarta.bpk.go.id/>). Predikat WTP dapat diartikan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman mampu menjalankan pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini replikasi dari penelitian Harnoni (2016) dengan perubahan variabel sistem pengendalian internal menjadi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu para peneliti yang dimasa mendatang untuk mengembangkan penelitian ini serta memperluas ilmu pengetahuan pada akuntansi pemerintahan di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Dalam hubungannya dengan sektor publik, teori yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah teori stewardship. Teori stewardship menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson *and* Davis, 1991). Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.

Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan asas otonomi dan menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, dan berprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam UUD 1945. Pemerintah daerah yaitu terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota, serta perangkat daerah lainnya yang menjadi penyelenggara dari pemerintah daerah itu sendiri.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 adalah laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah pentingnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh beberapa pihak yang berkepentingan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Ihsanti, 2014). Kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan kapasitasnya untuk menjalankan fungsi-fungsinya untuk menjalankan suatu sistem yang ada dalam sebuah organisasi serta menjadi kunci sukses tercapainya tujuan yang ada dalam organisasi tersebut.

Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, memproses, menyusun, dan menyimpan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dimana kualitas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, bisnis, dan pemerintahan (Sutabri, 2014). Teknologi informasi dapat berupa perangkat lunak, jaringan komputer, internet yang dapat digunakan sebagai alat tambahan untuk memudahkan suatu proses sehingga dapat dilakukan secara cepat dan efisien.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara dalam pasal 32 menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Upaya organisasi dalam mencari tujuannya tidak lepas dari potensi sumber daya manusia itu sendiri. Dengan majunya teknologi pada saat ini, perkembangan informasi yang ada, serta tersedianya modal yang memadai, apabila tanpa didukung dengan sumber daya manusianya, organisasi tidak akan dapat mencapai tujuannya (Sutrisno, 2011). Sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam penelitian Andini dan Yusrawati (2015), Rahayu., dkk (2014), Wati., dkk (2014), dan Nurlis *and* Yadiati (2017) menyatakan

kompetensi sumber daya manusia memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini peneliti juga sependapat dengan peneliti di atas untuk merumuskan hipotesis yakni:

H₁: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, memproses, menyusun, dan menyimpan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dimana kualitas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, bisnis, dan pemerintahan (Sutabri, 2014). Dengan adanya teknologi informasi akan mempermudah penyusunan laporan keuangan serta meningkatkan kinerja. Dalam penelitian Julita *and* Susilastri (2018), Alamsyah., dkk (2017), Hertati (2015), Suwanda (2015), Idward., *et al* (2018), Nuryanto *and* Afiah (2013), dan Muda., *et al* (2017) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini peneliti juga sependapat dengan peneliti di atas untuk merumuskan hipotesis yakni:

H₂: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

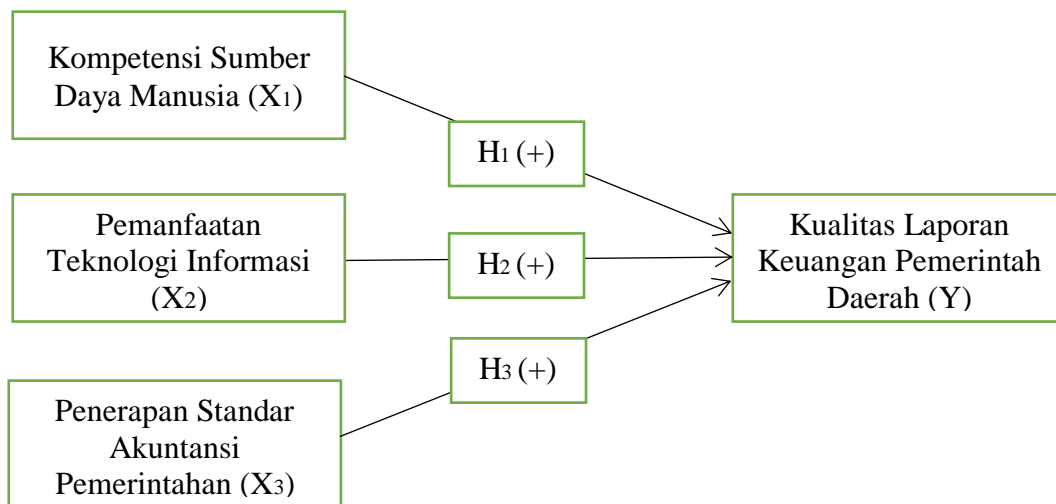
Penyampaian laporan keuangan daerah yang transparansi dan akuntabilitas harus mempunyai prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Nugraha, 2009). Sesuatu yang tidak mengikuti standar yang ada, tidak dapat dikatakan baik. Dalam penelitian Yunita (2015), Susilawati *and* Sudarno (2014), dan Hapazah (2017) yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peneliti juga berpendapat sama, maka dirumuskan hipotesis:

H₃: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian ini untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui strategi peneliti dalam melakukan penelitian ini yang menguji apakah ada pengaruh hubungan Variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 1. Desain Penelitian

Obyek/Subyek Penelitian

Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang tersebar di beberapa instansi daerah pemerintah Kabupaten Sleman. Teknik yang digunakan menggunakan metode *purposive sampling*. Pemilihan responden yaitu para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan SKPD di berbagai instansi pemerintah daerah Kabupaten Sleman yang menjabat sebagai kepala bagian, staf keuangan/akuntansi, maupun pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan dan yang telah lama bekerja lebih dari 1 tahun.

Definisi Operasional dan Variabel Pengukuran

Variabel bebas (X₁) yaitu: kompetensi sumber daya manusia memiliki kemampuan dan karakteristik berupa pendidikan, pengetahuan, keterampilan dalam

melaksanakan tugasnya. Sehingga dapat dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien. Indikator dalam variabel ini, yaitu: (pengetahuan, pelatihan, dan pengalaman) pengukuran dengan menggunakan kuesioner dengan skor skala likert 5 dan 8 item pertanyaan. Kuesioner diambil dari penelitian Triyanto (2017) dan Intan (2017).

Variabel bebas (X2) yaitu: pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang keberhasilan suatu proses kinerja dan upaya untuk mencapai tujuan serta visi misi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Indikator dalam variabel ini yaitu: (komputer dan jaringan internet) pengukuran dengan menggunakan kuesioner dengan skor skala likert 5 dan 9 item pertanyaan. Kuesioner diambil dari penelitian Triyanto (2017).

Variabel bebas (X3) yaitu: penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 sebagai prinsip atau acuan dalam penyajian maupun penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Indikator dalam variabel ini yaitu: Penerapan Basis AkruaI untuk Pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas, lalu Penerapan Basis kas untuk Pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, dan Penyajian secara wajar. Variabel ini diukur dengan kuesioner dengan skor skala likert 5 dan 9 item pertanyaan. Kuesioner diambil dari penelitian Ahsani (2016).

Variabel terikat (Y) yaitu: kualitas laporan keuangan pemerintah dapat diukur berdasarkan karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Pengukuran dengan menggunakan kuesioner dengan skor skala likert 5 dan 12 item pertanyaan. Kuesioner diambil dari penelitian Intan (2017).

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, bentuk pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada salah satu pegawai SKPD di setiap instansi pemerintah daerah Kabupaten Sleman, yang nantinya akan diserahkan ke pegawai di setiap instansi pemerintah daerah Kabupaten Sleman.

Instrumen dan Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif merupakan uji yang digunakan untuk menggambarkan dan mendiskripsikan data yang telah dikumpul (Ghozali, 2013). Uji statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai minimum (*max*), nilai maksimum (*min*), rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (*std. deviation*).

Uji Validitas

Uji validitas ini menggambarkan bahwa pertanyaan yang digunakan mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (*valid*) (Ghozali, 2013). Uji validitas dilakukan dengan menyebarkan minimal 30 kuesioner. Penelitian ini menggunakan uji validitas dengan melihat nilai signifikansi pada Total *Pearson Corellation*. Item pertanyaan dikatakan *valid* apabila nilai signifikansi pada Total *Pearson Corellation* > 0,25.

Uji Reliabilitas

Kuesioner dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Instrumen dipercaya jika jawaban dari responden atas pertanyaan yang ada konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan melihat koefisien *cronbach's alpha*, jika hasil menunjukkan angka > 0,70 maka dapat dikatakan instrumen pertanyaan dari variabel tersebut reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian yang berguna untuk menguji apakah variabel pengganggu atau *residual* memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Pengujian normalitas yang digunakan adalah dengan melihat nilai *sig* pada *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai *Asymp. Sig* > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut *residual* memiliki distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lain, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir (Ghozali, 2013). Untuk menguji adanya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *VIF* (*Varians Inflation Factor*) kecil dari 10 atau *tolerance* lebih besar dari 0,10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik. Model regresi yang baik yaitu model yang tidak terkena heteroskedastisitas atau disebut dengan model homoskedastisitas (Ghozali, 2013). Model regresi disebut model homoskedastisitas apabila *variance* dan *residual* satu pengamatan dengan pengamatan lain tetap. Uji heteroskedastisitas dilihat dari nilai signifikansi dalam regresi residual. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka variabel terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis dan Analisa Data

Model regresi linear berganda digunakan sebagai persamaan regresi. Bila memenuhi asumsi normalitas data dan terlepas dari asumsi maka dapat dikatakan model regresi linear berganda merupakan model yang terbaik. Persamaan regresi linier berganda yaitu:

$$Y^{\wedge} = a + b_1KSM + b_2PTI + b_3SAP + e$$

Keterangan:

Y^{\wedge}	= “Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”
a	= “Konstanta”
b_1	= “Koefisien Regresi Kompetensi Sumber Daya Manusia”
b_2	= “Koefisien Regresi Pemanfaatan Teknologi Informasi”
b_3	= “Koefisien Regresi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan”
KSM	= “Kompetensi Sumber Daya Manusia”
PTI	= “Pemanfaatan Teknologi Informasi”
SAP	= “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan”
e	= “Kesalahan (<i>error</i>)/ tingkat pengganggu”

Uji Koefisien Determinan (*Adjusted R²*)

Pengujian koefisien determinan (*Adjusted R²*) pada intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Koefisien determinan berkisar dari nol sampai dengan satu ($0 \leq Adjusted R^2 \leq 1$). Hal ini berarti bila nilai *Adjusted R²* = 0 menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila nilai *Adjusted R²* semakin besar terhadap variabel dependen, semakin besar pengaruhnya.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Nilai F)

Uji nilai F digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Nilai signifikan yang digunakan yaitu sebesar 5% atau $\alpha = 0,05$. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Regresi Berganda (Uji Nilai t)

Uji nilai t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam persamaan regresi berganda secara parsial (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *alpha* 0,05 ($\alpha=5\%$). Hipotesis diterima jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan arah koefisiennya sesuai dengan yang dihipotesiskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini merupakan pegawai di SKPD Kabupaten Sleman, khususnya yang bekerja di bagian keuangan masing-masing instansi daerah. Kuesioner disebar sebanyak 110 kuesioner yang terdiri dari 23 SKPD Kabupaten Sleman. bahwa dari 110 kuesioner yang disebar di 23 SKPD Kabupaten Sleman, terdapat 8 kuesioner yang tidak dikembalikan. Sementara itu dari 102 kuesioner yang berhasil dikembalikan, sebanyak 13 kuesioner tidak terisi dengan

lengkap yang pada akhirnya kuesioner tersebut tidak dapat digunakan. Sehingga data yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebanyak 89 kuesioner.

Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan dan mendiskripsikan data yang telah terkumpul, meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi.

Tabel 1.
Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL_KSM	89	23	40	31.69	3.084
TOTAL_PTI	89	27	45	36.98	3.855
TOTAL_SAP	89	27	45	36.45	3.838
TOTAL_LKPD	89	36	60	49.06	4.521
Valid N (listwise)	89				

Variabel kompetensi sumber daya manusia (KSM) memiliki nilai minimum 23 dengan nilai maksimum 40. Sementara itu, variabel kompetensi sumber daya manusia mempunyai rata-rata (mean) sebesar 31,69 dengan standar deviasi sebesar 3,084.

Variabel pemanfaatan teknologi informasi (PTI) memiliki nilai minimum 27 dengan nilai maksimum 45. Rata-rata yang diperoleh (mean) sebesar 36,98 dengan standar deviasi sebesar 3,855.

Variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki nilai minimum 27 dengan nilai maksimum 45. Variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki rata-rata (mean) sebesar 36,45 dengan standar deviasi sebesar 3,838.

Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memiliki nilai minimum sebesar 36 dengan nilai maksimum 60. Rata-rata (mean) menunjukkan angka sebesar 49,06 dengan standar deviasi 4,521.

Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengujian untuk mengukur sah atau *valid* tidaknya suatu kuesioner. Valid atau tidaknya suatu kuesioner dapat dilihat dari total perolehan nilai *Pearson Correlation*, yang mana apabila total nilai > 0,25 maka kuesioner dapat

dikatakan *valid*. Hasil pengujian validitas yang telah dilakukan pada item pertanyaan kuesioner menunjukkan hasil bahwa semua item pertanyaan pada setiap variabel memiliki nilai total *pearson correlation* $> 0,25$ sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan kuesioner yang digunakan adalah *valid* dan bisa digunakan.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk memberikan penjelasan seberapa besar konsistenan dari item yang digunakan untuk mengukur. Uji reliabilitas dilihat dari hasil koefisien *cronbach's alpha* untuk tiap variabel. Variabel yang memiliki nilai *cronbach's alpha* diatas 0,700 menunjukkan reliabilitasnya mencukupi, dan akan digunakan sebagai item pengukuran. Hasil uji reliabilitas untuk variabel kompetensi sumber daya manusia nilai *cronbach's alpha* 0,832. uji reliabilitas untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi nilai *cronbach's alpha* 0,886. Uji reliabilitas untuk variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan nilai *cronbach's alpha* 0,936. Uji reliabilitas untuk variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah nilai *cronbach's alpha* 0,913. Untuk semua variabel nilai *cronbach's alpha* $> 0,700$ maka dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu pengujian untuk melihat apakah data memiliki distribusi normal atau tidak. Uji yang dapat digunakan didalam penelitian menggunakan alat uji *Kormogrov-Smirnov*. *Kormogrov-Smirnov* memiliki kriteria yaitu jika nilai signifikansi (*Asymp. sig*) $> \alpha$ (0,05) maka *residual* dikatakan memiliki distribusi yang normal. Hasil pengujian uji normalitas yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa nilai *Asymp. Sig* sebesar (0,340) $> \alpha$ (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal sehingga dapat diuji dengan analisis regresi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi diantara variabel bebas yang cukup besar dalam model regresi. Untuk melihat apakah terjadi multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) atau

tolerance. Apabila nilai $VIF < 10$ atau *tolerance* $> 0,1$ maka menunjukkan bahwa di dalam persamaan regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
TOTAL_KSM	.484	2.066
TOTAL_PTI	.413	2.422
TOTAL_SAP	.442	2.264

Dependent Variable: TOTAL_LKPD

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai *VIF* dari masing-masing variabel independen pada penelitian ini < 10 serta memiliki nilai *tolerance* $> 0,1$. Maka dapat disimpulkan bahwa dari ke-tiga variabel tersebut tidak adanya masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu pengujian yang dilakukan guna melihat apakah di dalam model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari *residual*. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser*, apabila nilai signifikansi menunjukkan angka $> \alpha (0,05)$ maka tidak adanya masalah heteroskedastisitas.

Tabel 3.
Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
1 (Constant)	.873
TOTAL_KSM	.196
TOTAL_PTI	.391
TOTAL_SAP	.151

Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen pada penelitian ini lebih besar dari $\alpha (0,05)$. Maka dapat disimpulkan bahwa dari ke-tiga variabel tersebut tidak adanya masalah heteroskedastisitas, sehingga dapat diuji dengan analisis regresi.

Hasil Penelitian

Uji Koefisien Determinan (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinan yaitu uji yang dilakukan guna melihat bagaimana kemampuan suatu model untuk menjelaskan variasi variabel terikat.

Tabel 4.
Uji Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.874 ^a	.765	.756	2.231

a. Predictors: (Constant), TOTAL_SAP, TOTAL_KSM, TOTAL_PTI

Tabel 4 menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinan (*Adjusted R²*) sebesar 0,756 atau 75,6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan 75,6% variabel dependen. Sedangkan 24,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Nilai F).

Uji signifikansi simultan merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 5.
Uji Signifikansi Simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1375.491	3	458.497	92.083	.000 ^a
	Residual	423.228	85	4.979		
	Total	1798.719	88			

a. Predictors: (Constant), TOTAL_SAP, TOTAL_KSM, TOTAL_PTI

b. Dependent Variable: TOTAL_LKPD

Berdasarkan Tabel 5 hasil uji signifikansi simultan menunjukkan besarnya nilai *sig* adalah 0,000. Nilai *sig* 0,000 < *alpha* 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Regresi Berganda (Uji Nilai t).

Uji koefisien regresi berganda merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

secara parsial. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 6.
Uji Koefisien Regresi Berganda (Uji Nilai t).

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.283	2.653		2.368	.020
TOTAL_KSM	.329	.111	.225	2.969	.004
TOTAL_PTI	.289	.096	.246	3.006	.003
TOTAL_SAP	.594	.093	.505	6.374	.000

a. Dependent Variable: TOTAL_LKPD

Berdasarkan Tabel 6 dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 6,283 + 0,329 (KSM) + 0,289 (PTI) + 0,594 (SAP) + e$$

Adapun hasil pengujian terhadap hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai koefisien regresi dengan arah yang positif sebesar 0,329 dengan signifikansi sebesar $0,004 < \alpha 0,05$. Berdasarkan nilai koefisien regresi dan signifikansi tersebut, maka kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis (H_1) diterima.

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai koefisien regresi dengan arah yang positif sebesar 0,289 dengan signifikansi sebesar $0,003 < \alpha 0,05$. Berdasarkan nilai koefisien regresi dan signifikansi tersebut, maka pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis (H_2) diterima.

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai koefisien regresi dengan arah yang positif sebesar 0,594 dengan signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$. Berdasarkan nilai koefisien regresi dan signifikansi tersebut, maka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh

positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis (H_3) diterima.

Pembahasan (Interpretasi)

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi berganda menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai signifikansi 0,004 dengan arah koefisien positif sebesar 0,329. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) yang menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diterima.

Dalam hal ini dapat ditemukan bahwa pegawai SKPD Kabupaten Sleman sudah memiliki pengetahuan teknis tentang akuntansi, sudah mendapatkan pelatihan bekerja di bidang akuntansi, serta memiliki pengalaman bekerja di bidang akuntansi.

Hal ini sejalan dengan penelitian Andini dan Yusrawati (2015), Rahayu., dkk (2014), Wati., dkk (2014), dan Nurlis *and* Yadiati (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi berganda menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai signifikansi 0,003 dengan arah koefisien positif sebesar 0,289. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) yang menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diterima.

Dalam hal ini dapat ditemukan bahwa pengelolaan keuangan akuntansi sudah menggunakan komputer dan *software* yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang

berlaku. Pengelolaan laporan keuangan telah memanfaatkan jaringan internet di unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Julita *and* Susilastri (2018), Alamsyah., dkk (2017), Hertati (2015), Suwanda (2015), Idward., *et al* (2018), Nuryanto *and* Afiah (2013), dan Muda., *et al* (2017) yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi berganda menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai signifikansi 0,000 dengan arah koefisien positif sebesar 0,594. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) yang menjelaskan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diterima.

Dalam laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas ,serta penerapan pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta transaksi-transaksi di laporan keuangan sudah disajikan secara wajar yang artinya sesuai dengan kenyataannya.

Hal ini sejalan dengan penelitian Yunita (2015), Susilawati *and* Sudarno (2014), dan Hapazah (2017), yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

PENUTUP

Simpulan

Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, peran sumber daya manusia sangat penting. Jika sumber daya manusia berkualitas, maka hasil dari laporan keuangan juga akan berkualitas pula.

Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung pula dengan tersedianya sarana prasarana berupa komputer yang memadai serta jaringan internet yang cepat guna membantu, mempercepat proses dalam pelaporan keuangan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam melakukan pelaporan keuangan, SKPD Sleman terutama di bagian keuangan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Implikasi

Berbagai temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya SKPD Kabupaten Sleman dalam proses pemerintahan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk SKPD Kabupaten Sleman untuk menjaga konsistensi dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas, meningkatkan mutu sumber daya manusia, peningkatan penggunaan teknologi informasi serta konsisten menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis diharapkan menambah variabel yang secara intens berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian mendatang diharapkan lebih memperbanyak jumlah sampel penelitian dan memperluas cakupan wilayah penelitian.

Keterbatasan

Teknik pengumpulan data yang digunakan berasal dari hasil kuesioner sehingga data yang diperoleh berkemungkinan terdapat bias. Jumlah sampel dalam penelitian

masih tergolong sedikit dan belum menyeluruh hingga tingkat kecamatan sehingga kurang dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsani, I., 2016. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Serta Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Alamsyah, Muhammad Rifky., Rahayu, Sri., Muslih, Muhammad., 2017. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kineja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 15(2). 201–210.
- Andini, D., dan Yusrawati., 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akutansi*. 24 (Juni 2015), 65–82.
- Donaldson, L., and Davis, J. H., 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*. (June 1991), 49–65.
- Ghozali, Imam., 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hapazah, B., 2017. Determinant Quality Of Regional And Financial Statements (Study On Local Government Regency Of Lombok Timur). *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 5(12), 7782–7788.
- Harnoni., 2016. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jom FEKON Vol. 3 No. 1*, 1079–1093.
- Hertati, L., 2015. Competence of Human Resources, The Benefits of Information Technology on Value of Financial Reporting in Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*. 6(8), 12–18.
- Idward, N. N., Majid, J., and Mediyati., 2018. The Effect of Competence of Human Resources, Information Technology and Accountability on the Quality of Regional Financial Statements With Internal Control Systems As a Moderation (Study in District of Gowa). *International Journal Economics Management and Social Science*, 1(4), 142–155.
- Ihsanti, E., 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, *E-Journal Akuntansi UNDIP*, 203.
- Intan, A., 2017. Pengaruh Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi

- Perangkat Daerah Di Kabupaten Banjarnegara). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Julita and Susilastri., 2018. Analysis Of Factor Affecting The Quality Of Government Financial Report Bengkalis Regency. *Journal International Scientific. O F*, 7(2), 157–164.
- Menteri Dalam Negeri., 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Muda, I., Wardani, D. Y., Erlina, Maksum, A., Lubis, A. F., Bukit, R., and Abubakar, E., 2017. The Influence Of Human Resources Competency And The Use Of Information Technology On The Quality Of Local Government Financial Report With Regional Accounting System As An Intervening. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 95(20), 5552–5561.
- Nugraha, W., 2009. Pengaruh Pemahaman atas Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Keefektifan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi sebagai Variabel Mediasi. *Skripsi*. Bandung. Universitas Padjajaran.
- Nurillah, As Syifa., dan Muid, D., 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAKD, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E- Journal Akuntansi UNDIP*, 3, 1–13.
- Nurlis., and Yadiati, W., (2017). The Influence of Internal Control Effectiveness , Information Technology Utilization and Human Resources Competence on Local Government Financial Reporting Quality (Survey on SKPD Banten Provincial Government and Serang City). *Research Journal of Finance and Accounting*, 8(12), 111–124.
- Nuryanto, M., and Afiah, N. N., 2013. The Impact of Apparatus Competence, Information Technology Utilization and Internal Control on Financial Statement Quality (Study on Local Government of Jakarta Province-Indonesia). *World Review of Business Research*, 3(4), 157–171.
- Presiden Republik Indonesia., 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Presiden Republik Indonesia., 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Presiden Republik Indonesia., 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Presiden Republik Indonesia., 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rahayu, Liza., Kennedy., dan Anisma, Y., 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). *JOM FEKON Vol. 1 Nomor. 2 Oktober*, 1–15.
- Susilawati., and Sudarno., 2014. Effect of Government Accounting Standards of Quality of Financial Statements and Implications on Local Government Accountability Performance (A Case Study in the Department Pekanbaru). *International Journal Of Empirical Finance*, 3(5), 243–254.
- Sutabri, T., 2014. *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta. ANDI.

- Sutrisno, E., 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Suwanda, D., 2015. Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(4), 139–157.
- Triyanto, H., 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Peran Inspektorat Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Wati, Kadek D., Trisna, H N., Sinarwati, K., 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Journal SI Ak*, 2.
- Yosefrinaldi., 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, 2013. Vol.1, No. 1.
- Yunita, T. A., 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kota Dumai), *Jom FEKON Vol. 2 No. 2*.
- <http://yogyakarta.bpk.go.id/> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2018)